

SOLIDITAS KABINET INDONESIA MAJU DI TENGAH KONTESTASI PEMILU 2024

6

Prayudi*

Abstrak

Soliditas Kabinet Indonesia Maju dan kontestasi Pemilu serentak 2024 menjadi salah satu poin krusial bila dihadapkan dengan persentase perkiraan perolehan suara Pemilu 2024 metode quick count. Meskipun belum resmi dalam penetapan hasil Pemilu 2024, proses konsolidasi pemerintahan ditampilkan dengan mengakomodasi Partai Demokrat yang sebelumnya di luar pemerintahan, agar kemudian bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Setelah pemungutan suara Pemilu 2024, pendekatan terhadap petinggi partai-partai politik gencar dilakukan presiden guna menjaga soliditas kabinet. Dengan kata lain, hal ini merupakan bagian dari politik partisan presiden. Tulisan ini membahas bagaimana memahami politik Presiden Jokowi dalam menjaga soliditas Kabinet Indonesia Maju di tengah kontestasi Pemilu 2024. Upaya menjaga soliditas kabinet di tengah kontestasi pemilu dinilai lebih dari sekedar normatif kewenangan prerogatif presiden. Oleh karena itu penting bagi DPR RI untuk mengajukan usul inisiatif draf RUU Lembaga Kepresidenan.

Pendahuluan

Pasca pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam (Tim Kompas, 2024). Upaya menuju

proses konsolidasi pemerintahan berlangsung cepat dengan tujuan untuk menjaga soliditas kabinet. Harapannya agar program-program atau kebijakan pemerintahan saat ini akan berkelanjutan, bahkan hingga pemerintah hasil Pemilu 2024 resmi terbentuk. Kisaran 8 bulan menuju pengambilan sumpah/janji presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang, Presiden Jokowi menunjukkan upaya



peletakan fundamental kabinet saat ini.

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat (PD), AHY, sebagai menteri itu dinilai sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko politik pasca Pemilu 2024. Khusus bagi PD, masuknya AHY ke dalam kabinet mengakhiri status partai itu yang sejak 2014 berada di luar pemerintahan.

Langkah akomodasi kabinet di tengah transisi pemerintahan dan kontestasi Pemilu 2024 adalah bagian dari politik partisan presiden yang bersifat strategis. Di tingkat praktis, hal ini tidak sekedar soal kewenangan prerogatif presiden sesuai norma ketatanegaraan konstitusi, Pasal 17 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Apalagi, sejak masa kampanye Pemilu 2024, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju sempat mengalami dugaan akan menghadapi mundurnya beberapa menteri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tulisan ini membahas bagaimana memahami politik Presiden Jokowi dalam menjaga soliditas Kabinet Indonesia Maju di tengah kontestasi Pemilu 2024.

Politik Partisan Presiden di Tengah Kontestasi Pemilu

Dalam sistem presidensial, stabilitas pemerintahan tercermin dari soliditas kabinet. Soliditas ini akan tergantung dari cara presiden menjaga koalisi partai-partai pendukungnya. Umumnya pergantian anggota kabinet akan menyulitkan pemerintahan dalam menjalankan program-program

kebijakannya (Shin, 2013, pp. 317). Pada Pemilu 2024, upaya Presiden Jokowi dalam menjaga soliditas kabinet tidak terpisah dari bagian politik partisan. Sehubungan dengan ini dilakukan negosiasi, akomodasi dan pendekatan dengan beberapa partai pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang sebagian besar diisi oleh partai-partai yang telah berada dalam Kabinet Indonesia Maju. Langkah politik Presiden Jokowi juga menjangkau di luar partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Salah satu contohnya Jokowi melakukan pendekatan dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), melalui pertemuannya dengan Ketua Umumnya, Surya Paloh, pada 18 Februari 2024. Diketahui, Partai Nasdem tetap menempatkan kadernya dalam Kabinet Indonesia Maju, meskipun ketika Pemilu 2024 Nasdem merupakan salah satu partai pengusung paslon nomor urut 1, Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Presiden Jokowi sudah menjabat 2 periode (2014-2019 dan 2019-2024) dan tidak dapat mencalonkan diri lagi. Namun Jokowi tetap memiliki tingkat *approval rating* yang tinggi dalam tahapan Pemilu 2024, termasuk di tahapan kampanye. Survei Data Riset Analitika menunjukkan 81,7% masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan sebanyak 9,3% di antaranya merasa sangat puas dipimpin oleh Presiden Jokowi (Rasat, 2024). Posisi *approval rating* memberi peran besar bagi Presiden Jokowi untuk menjaga soliditas Kabinet Indonesia Maju.

Upaya strategis kemudian dilakukan dalam rentan waktu menuju penetapan hasil Pemilu 2024 (Sari, 2024). Pada masa transisi

pemerintahan, antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah resiko politik. Salah satu caranya dengan menjadi bagian dari politik partisan guna menjaga soliditas kabinet. Apalagi mengingat partai-partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju menurut hasil penghitungan cepat (tidak resmi) suara Pemilu 2024 mengalami perubahan konstelasinya. Hasil penghitungan tidak resmi menyiratkan bahwa Partai Golkar dan Gerindra berada pada satu sisi, sedangkan PDI P serta PKB di sisi lainnya. Ini sebagaimana ditampilkan dalam hasil *Quick Count* dan *Exit Poll* di tanggal 14 Februari 2024 mengenai perkiraan perolehan kursi partai peserta Pemilu Anggota DPR, soal lemahnya efek ekor jas, dan yang lolos ambang batas parlemen (Mujani, 2024).

Berdasarkan upaya politik partisan maka jika saat ini semua partai yang mengusung Prabowo-Gibran solid, keseluruhannya terdapat 261 kursi di DPR (Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN). Bandingkan, dengan partai-partai pengusung Ganjar-Mahfud MD yang memiliki kursi di DPR secara keseluruhan 147 kursi (Fraksi-PDI P dan Fraksi PPP). Meskipun demikian, perhitungan ini dapat berubah jika setelah Pemilu 2024 PPP bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Adapun partai-partai pengusung Anis-Muhaimin yang memiliki kursi di DPR seluruhnya berjumlah 167 kursi (F-Nasdem dan F-PKB dan F-PKS). Kalau dua kubu yang disebut terakhir bergabung dan solid, maka keseluruhan mencapai 314 kursi. Artinya, partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju lebih besar jumlahnya.

Itu sebabnya, setelah Pemilu 2024, politik partisan Presiden Jokowi bermetamorfosis melalui pendekatan kepada partai-partai guna menjaga soliditas kabinet. Misalnya, beberapa hari setelah bertemu dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya bertemu dengan semua ketua umum partai politik. Dirinya ingin menjadi jembatan bagi seluruh kekuatan politik pascapemilu. Bersamaan dengan keinginan tadi, muncul juga fenomena lobi-lobi dari kubu Prabowo-Gibran ke partai-partai politik pengusung Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD melalui petinggi lapis kedua di partai tersebut (Priyombodo, 2024). Dengan demikian, politik partisan presiden leluasa dijalankan untuk kepentingan kabinet. Hal ini juga terjadi karena Indonesia tidak mempunyai UU Lembaga Kepresidenan, meskipun sudah ada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Soliditas Kabinet

Popularitas Presiden Jokowi yang tinggi di tengah kontestasi Pemilu 2024, menyebabkan ketentuan batas jabatan presiden maksimal 2 periode menjadi tidak masalah. Terutama dalam upaya menjaga soliditas kabinet. Koalisi partai-partai di kabinet juga tetap terjaga dan tidak berlaku *lame duck government*. Khusus pada Pilpres 2024, seolah kembali ditegaskan bahwa figur dapat berperan untuk menentukan peta politiknya dibandingkan partai atau gabungan partai. (Budiatri, dalam Amalia, et.al, 2016, pp. 94-95). Pernyataan Presiden terkait

kampanye ternyata tidak terlampau berpengaruh pada potensi retaknya soliditas kabinet. Meskipun di sisi lain, ini ditandai dengan perjalanan mundurnya Menko Polhukam dari kabinet. Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi di kabinet pada saat tahapan Pemilu 2024 berlangsung di tingkat kampanye Pilpres (Nugraheny, 2024).

Sedangkan isu pengunduran diri menteri-menteri kabinet yang sejak awal mengandung spekulasi tersendiri di tengah persaingan politik Pilpres 2024 tidak terjadi. Isu pengunduran diri serupa karena perbedaan politik dukungan dalam pemilu. Ini misalnya, terbukti sebagaimana pengunduran diri Andi Widjajanto dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), pada 16 Oktober 2023.

Presiden Jokowi menyangkal adanya isu perpecahan para menteri. Presiden menyatakan bahwa Menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap bekerja sebagaimana biasa (Rikang, 2024). Upaya yang ditempuh untuk menjaga soliditas kabinet tidak hanya terkait relasi personal antar anggotanya saja, tetapi juga bagi kelanjutan program kerja di tingkat kementerian yang dianggap sangat strategis. Misalnya, Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menemui Mahfud MD di kediamannya (Polhukam, 2024) untuk membahas beberapa persoalan yang ditangani oleh Menko Polhukam.

Penutup

Proses konsolidasi koalisi partai-partai pendukung paslon Pilpres sebelum dan setelah pemungutan suara Pemilu 2024 merupakan negosiasi menuju soliditas kabinet. Hal ini tidak hanya sekedar normatif

kewenangan prerogatif presiden, namun secara praktis juga menjadi bagian dari politik partisan yang dijalankan oleh Presiden. Praktik politik partisan mempunyai arti yang strategis, tetapi juga paradoks. Terutama bila dilakukan dalam upaya menjaga soliditas kabinet.

Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan agar DPR mengajukan usul inisiatif draf RUU Lembaga Kepresidenan. RUU ini dapat memuat pengaturan tentang posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta sekaligus sebagai pribadi. Selama ini studi tentang Lembaga Kepresidenan bagi landasan lahirnya Naskah Akademik (NA) dan penyusunan draf RUU Kepresidenan masih terbatas. Diawal reformasi 1998 Pusat Pengkajian & Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPR pernah membuat kajian bagi RUU Lembaga Kepresidenan. Ini dapat menjadi bahan awal bagi kajian lebih lanjut dilahirkannya NA dan draf RUU Kepresidenan usul inisiatif DPR.

Referensi

- Amalia, Luky Sandra (editor). (2016). *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*. Pustaka Pelajar & P2P LIPI.
- Kompas, Tim. (2024, Februari 22). Presiden Jokowi Antisipasi Risiko Politik Pascapemilu. *Kompas*, hlm. 1.
- Menko Polhukam. (2024). Siaran Pers No. 19/SP/HM.01.02 (2024). Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi dengan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. *polhukam.go.id*. <https://polhukam.go.id/menko->

polhukam-hadi-tjahjanto-silaturahmi-dengan-mantan-menko-polhukam.

Mujani, Saiful Research & Consulting. (2024). Partai dan Hilangnya Efek Ekor Jas: Temuan Quick Count dan Exit Poll 14 Februari 2024. *SMRC*, hlm. 14.

Nugraheny, Dian Erika & Yahya, Achmad Nasrudin. (2024, Februari 01). Mahfud MD Resmi Mengundurkan Diri dari Menko Polhukam. *nasional.kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/17205861>.

Priyombodo. (2024, Januari 24). Koalisi Perubahan Kembali Tunjukkan Soliditas. *Kompas*, hlm. 2.

Rassat, Fianda Sjojfan. (2024, Januari 31). Data Riset Analitika: Approval Rating Jokowi 81, 7 Persen. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/3940161/data-riset-analitika-approval-rating-jokowi-817-persen>.

Rikang, Raymundus, dkk. (2024, Februari 05-11). Gerbong Lepas Pembantu Presiden. *Tempo*, hlm. 34.

Sari, Brigitta Bella Permata. (2024, Februari 23). Jawaban Surya Paloh Soal Wacana Hak Angket Usulan Ganjar. *news.detik.com*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7208731/jawaban-surya-paloh-soal-wacana-hak-angket-usulan-ganjar>.

Shin, Jae Hyeok. (2013). Cabinet Duration in Presidential Democracies. *Political Science Quarterly*, 128 (2), 317, <https://www.jstor.org/stable/23563308>, Volume-128.